



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PROTOKOL KESEHATAN TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Ekonomi Tumbuh, Produktivitas Kinerja Harus Meningkat

YOGYA (KR) - Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogya mulai menunjukkan pertumbuhan meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kinerja dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta HM Fursan SE, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Yogya ini pun mendapat apresiasi dari pusat. "Kita semua berharap pertumbuhan ekonomi semakin baik. Ibarat gayung bersambut, kita harus terus optimis dengan meningkatkan kinerja dengan protokol yang disiplin," jelasnya.

Anggota Fraksi PAN ini pun sempat melakukan pendampingan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya dan ditemui secara langsung oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Dra Indah Anggoro Putri MBus. Pada kesempatan tersebut pihaknya berdiskusi banyak hal berkaitan persoalan ketenagakerjaan di daerah. Salah satunya menyangkut produktivitas kinerja untuk meningkatkan daya saing daerah.

Fursan juga tidak menampik, dampak pandemi banyak tenaga kerja di Kota Yogya yang terpaksa

HM Fursan SE
Wakil Ketua DPRD
Anggota Fraksi PAN



KR-Ardhi Wahdan

dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka yang sebelumnya tercover jaminan melalui BP Jamsostek maupun BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan, otomatis ikut terhenti. Kalangan dewan pun mengusulkan agar mereka tetap bisa menikmati jaminan dengan subsidi dari Pemkot Yogya. "Rencananya anggaran tersebut akan dimasukkan ke dalam KUA PPAS. Sudah ada kalkulasi kebutuhannya dan tidak akan membebani keuangan daerah," urainya.

Dengan adanya fasilitasi pembayaran iuran untuk BPJS Kesehatan maupun BP Jamsostek, diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi pekerja yang di PHK maupun dirumahkan tersebut.

Di samping itu, perlindungan juga menyangkut kepastian hak pekerja. Sesuai regulasi ada perbedaan antara tenaga honorer, kontrak, magang, outsourcing maupun casual. Terutama karyawan casual atau yang tidak memiliki jam kerja tetap. Karyawan tersebut biasanya baru dibutuhkan jika volume pekerjaan meningkat. "Kepastian status pekerja itu akan menentukan hak mereka. Tetapi dalam masa pandemi ini semua harus disiplin menerapkan protokol. Jangan sampai abai meski sudah berlangsung lebih dari setahun," katanya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005